

LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO

TAHUN ANGGARAN 2021

(JL. BENTENG PANCASILA NO. 21 B KOTA MOJOKERTO)



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Kota Mojokerto yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan laporan ini, anggaran belanja tahun 2021 sebesar Rp.9.954.214.556,00 sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.8.160.779.526,00 atau 81,98 % dari yang dianggarkan dalam APBD TA 2021.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset adalah sebesar Rp 4.417.032.567,00 dan kewajiban sebesar Rp.0,00. Ekuitas dana sebesar Rp.4.417.032.567,00
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang



kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rincian atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Mojokerto, 31 Desember 2021
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mojokerto

MOCH. IMRON, S.Sos.MM
_Pembina Utama Muda
NIP. 19720828 199201 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	III
Pernyataan Tanggung Jawab	V
I. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	
II. Laporan Operasional (LO)	
III. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	
III. Neraca	
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	
I Pendahuluan	1
1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD	3
II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD	5
2.1 Ekonomi Makro	5
2.2 Kebijakan Keuangan	6
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	7
III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD	12
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	12
3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	17
IV Kebijakan Akuntansi	18
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD	18
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	18



4.3	Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	19
4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan SKPD	23
V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD	24
5.1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	24
5.2	Neraca	31
5.3	Laporan Operasional (LO)	50
5.4	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	60
VI	Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan SKPD	59
VII	Penutup	65



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO/PENGGUNA ANGGARAN

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan P Kota Mojokerto yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mojokerto, 31 Desember 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto
Pengguna Anggaran

MOCHIMRON,S.Sos.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720828 199201 1 001



BAB I PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dalam periode pelaporan tahunan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan masalah ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
3. Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi, alokasi dan penggunaannya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
4. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto serta hasil-hasil yang telah dicapai.
5. Menyediakan informasi mengenai cara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto ;



7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto disusun dengan sistematika sebagai berikut :



- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

- Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD
 - 2.1 Ekonomi makro
 - 2.2 Kebijakan keuangan
 - 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
 - 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

- Bab IV Kebijakan akuntansi
 - 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
 - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan SKPD.

- Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
 - 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan (Khusus SKPD Penghasil)
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan (Khusus SKPKD)
 - 5.1.4 Aset
 - 5.1.5 Kewajiban
 - 5.1.6 Ekuitas dana
 - 5.1.7 Komponen-komponen laporan arus kas
 - 5.2 Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban SKPD.
 - 5.3 Catatan Penting Lainnya
 - 5.4 Pengungkapan Penting Lainnya

- Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

- Bab VII Penutup





BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto menurut urusan kegiatan yang diuraikan dalam Bab II angka 2.3 sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

No	Nama Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja			%
			Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
A.	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.402.454	33.786.200	92,81
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, sop, RKA ,DPA	28.978.454	26.985.900	93,12
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah Buku Profil yang disusun	7.424.000	6.800.300	91,60
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.201.644.848	2.992.008.275	93,45
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	3,085,876.939	2.891.602.875	93,70
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	112.860.000	97,540.000	86,43
3.	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah Laporan Keuangan	2.907.909	2.865.400	98,54



C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			51.274.000	40.925.000	79,82	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah pakaian khusus	51.274.000	40.925.000	79,82
D. Administrasi Umum Perangkat Daerah			612.868.348	522.171.800	85,20	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor	8.692.908	8.685.000	99,91
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Jumlah Kebutuhan computer dan kelengkapannya	231.442.586	208.928.100	90,27
3.	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	43.417.999	42.622.500	98,17
4.	Penyediaan Barsang cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang sediakan	45.789.310	30.668.200	66,98
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah bahan bacaan dan perundang – undangan yang dibaca/dimanfaatkan	16,281,454	14.105.000	86,63
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah makan dan minum kantor yang disediakan Jumlah Pemenuhan Kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	267,244.091	217.163.000	81,26



E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		83.646.700	80.560.000	96,31	
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia Jumlah perlengkapan kantor	83.646.700	80.560.000	96,31
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		260.076.500	235.214.251	90,44	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet yang dibayarkan tepat waktu	88.476.500	66.988.897	75,71
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	171.600.000	168.225.354	98,03
G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		363.172.493	234.920.700	64,69	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	156.731.999	124.035.000	79,14
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	31.000.000	31.000.000	100
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah paket pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor	175.440.494	444.406.300	46,18
H.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		962.395.409	444.406.300	46,18	



1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah kegiatan bela Negara, cerdas cermat dan revolusi mental Jumlah kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan, rakor tim PPWK, rakor	962.395.409	44.406.300	46,18
I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			853.467.285	199.816.500	23,41
1.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik D	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pemantauan perkembangan politik, verifikasi bantuan keuangan parpol Jumlah parpol yang terdaftar dan yang dibina Jumlah peserta pendidikan politik masyarakat	853.467.285	199.816.500	23,41
J.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat			283.873.196	236.574.700	83,34
1.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah LSM/ ormas yang berpartisipasi dalam jamboree Jumlah LSM/Ormas yang mengikuti forum diskusi antar ormas Jumlah Parpol / Lsm/ormas yang dibina	283.873.196	236.574.700	83,34



K.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanthapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		664.242.993	309.057.100	46,53	
1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah Deseminasi,Rakor dan sosialisasi P4GN Jumlah Rakor FKUB,sosialisasi PBM dan Hibah Jumlah Rakor Tim Intruksi Hari Besar Keagamaan	664.242.993	309.057.100	46,53
L.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanthapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		2.581.150.330	1.322.727.700	51,25	
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah Pelatihan intelejen 1 dan 2 Jumlah pembinaan FKDM dan fasilitas ketahanan bangsa Jumlah pembinaan wilayah Jumlah Rakor tim PKS	1.333.652.987	1.065.577.700	79,90
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah Rakor forpimda, Tim pora, Tim Verifikasi Hibah dan Hibah	1.247.497.343	257.150.000	20,61



Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
---	--	--	--	--	--

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Sebagaimana yang lazim terjadi pada setiap kegiatan akan adanya suatu hambatan/kendala yang dapat mempengaruhi tingkat prosentase keberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Hambatan dan kendala itu baik bersifat internal maupun eksternal, baik yang dapat dikendalikan ataupun tidak dapat dikendalikan.

SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto memiliki kegiatan yang mayoritas diperuntukkan langsung dalam melayani masyarakat, sehingga disana-sini sedikit memiliki hambatan dan kendala dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Berikut beberapa hambatan dan kendala yang dialami Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2021, antara lain :

- a. Kurangnya personil, terutama staf yang cakap dalam mengoperasikan IT untuk mengerjakan administrasi keuangan sehingga pengerjaan laporan kadang terlambat.
- b. Kurangnya personil pendukung lainnya dalam rangka pencapaian target kinerja seperti :
 - Masih kurangnya tenaga yang membantu di masing masing bidang
 - Kurangnya koordinasi, sehingga dalam menyampaikan data laporan realisasi mengalami keterlambatan.

Demikian kiranya kendala dan hambatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat tercapainya target kinerja dengan harapan di tahun-tahun mendatang ada penambahan personil untuk mengisi kekurangan-kekurangan tersebut sehingga hambatan untuk pencapaian target bisa diminimalisir.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah (KUD) atau dikeluarkan dari KUD.

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUD. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.



4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini disusun dengan berpedoman pada kebijakan akuntansi yang meliputi kebijakan akuntansi aset, kebijakan akuntansi kewajiban dan kebijakan akuntansi ekuitas dana.

(1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.



c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca SKPD per 29 Desember 2017 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2018 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang



mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet SKPD yang dialihkan penagihannya kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(2) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.



b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(3) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara asset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan sesuai dengan SAP diantaranya dalam pengakuan aset tetap telah berdasarkan harga perolehan.

Kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos dalam laporan keuangan daerah yang belum sesuai dengan SAP, diantaranya Aset tetap belum dilakukan penyusutan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

5.1.1 Pendapatan

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
0	0	0

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2021, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar Rp.0 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dari anggaran. Sedangkan realisasi pendapatan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dari realisasi pendapatan tahun 2020.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan tahun 2021 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1.					
2.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3.					
TOTAL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD TA 2021 sebesar Rp.0 atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.0. Sedangkan realisasi PAD pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dari realisasi tahun 2020. Rincian anggaran dan realisasi PAD tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah TA 2021 adalah nihil.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah TA 2021 sebesar Rp.0 atau 0 dari yang dianggarkan sebesar Rp.0. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.					
2.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3.					
4.					
TOTAL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2021 adalah nihil.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain2 PAD yang sah TA 2021 adalah nihil.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 adalah nihil.

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2021 adalah nihil.

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2021 adalah nihil.

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Anggaran untuk transfer dari pemerintah provinsi pada tahun 2021 adalah nihil.



5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2021 sebesar Rp. 1.508.611.000 Atau 91,52.% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.508.614.768. Rincian bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Bantuan Keuangan

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Bantuan Keuangan Kepada Parpol	611.604.768,00	611.601.000,00	100	0
TOTAL		611.604.768,00	611.601.000,00	100	0

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain2 Pendapatan yang sah TA 2021 adalah nihil.

5.1.2 Belanja

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
<u>9.954.214.556</u>	<u>8.160.779.526</u>	<u>4.694.751.742</u>

Realisasi Belanja TA 2021 sebesar Rp.8.160.779.526 atau 81,987% dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.954.214.556. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.3.466.027.784 atau sebesar 38,2%. Rincian anggaran dan belanja daerah tahun 2021, yaitu:

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Belanja

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1.	Belanja Operasi	9.678.256.056,00	7.908.219.526 ,00	81,71	4.654.172.392,00
2.	Belanja Modal	275.958.500,00	252.560.000,00	91,52	40.579.350,00
TOTAL		9.954.214.556,00	8.160.779.526	81,98	4.694.751.742,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2021 sebesar Rp.7.908.219.526 atau 81,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.678.256.056,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2021.



Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	3.213.996.939,00	3.001.992.875,00	93,40	2.930.704.103,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	4.955.644.349,00	3.397.615.651,00	68,56	1.723.468.289,00
3.	Belanja Hibah	1.508.614.768,00	1.508.611.000,00	100	0
TOTAL		9.678.256.056,00	7.908.219.526,00	81,71	4.654.172.392,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp.3.001.992.875,00 atau 93,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.213.996.939,00 yang terdiri dari:

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.521.612.763,00	1.476.652.192,00	97,04	1.510.872.081,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.564.264.176,00	1.414.950.683,00	90,45	1.309.994.522,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	128.120.000,00	110.390.000,00	86,16	0
TOTAL		3.213.996.939,00	3.001.992.875,00	93,40	2.820.866.603,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp.3.397.615.651,00 atau 68,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.955.644.349,00 yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.452.527.093,00	918.664.700,00	63,24	55.347.975,00
2.	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	30.280.000,00
3.	Belanja Jasa Kantor	2.609.895.354,00	1.954.287.997,00	71,62	464.366.534,00
4.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.200.000,00	9.825.354,00	74,43	7.321.980,00
5.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	44.005.000,00
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	6.668.000,00
7.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	220.583.864,00	70.320.000,00	31,87	0,00
8.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	25.545.000,00	22.750.000,00	89,05	0,00
9.	Belanja Aset Tetap Lainnya	940.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Belanja Jasa Konsultansi Non	24.200.000,00	14.901.700,00	61,57	0,00



No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
	Konstruksi				
11.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	3.600.000,00	3.600.000,00	100	0,00
12.	Belanja Sewa sarana mobilitas	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
13.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	0,00	0,00	0,00	18.168.500,00
14.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	74.254.000,00
15.	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
16.	Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	43.715.000,00
17.	Belanja pemeliharaan Tanah	39.264.957,00	0,00	0,00	0,00
18.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	163.937.544,00	130.470.900,00	79,58	0,00
19.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	111.973.537,00	64.984.000,00	58,03	0,00
20.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	242.875.000,00	204.011.000,00	83,99	281.841.300,00
21.	Belanja Jasa Yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya	47.100.000,00	3.800.000,00	12,41	0,00
22.	Belanja Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	633.187.500,00
23.	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	168.150.000,00
TOTAL		4.955.644.349,00	3.397.615.651,00	68,56	1.833.305.789,00

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2020 sebesar 0. Atau 0.% dari yang dianggarkan sebesar 0.dari anggaran yang telah ditetapkan, yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
1.	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat (Polres)	660.000.000,00	660.000.000,00	100	0,00
2.	Belanja Hibah Kepada lembaga yang berbadan Hukum (FKUB)	237.010.000,00	237.010,00	100	0,00
TOTAL		897.010.000,00	897.010.000,00	100	0,00



5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada tahun 2021, belanja bantuan sosial adalah *nihil*.

5.1.2.2 Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Anggaran belanja modal tahun 2021 adalah sebesar Rp.275.958.500,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.252.560.000,00 atau sebesar 91,52%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2020, realisasi belanja modal pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.211.980.650,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2021:

Tabel 10. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	264.298.500,00	240.940.000,00	91,16	25.500.000,00
2.	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	11.660.000,00	11.620.000,00	99.56	15.079.350,00
TOTAL		275.958.500,00	252.560.000,00	91,52	40.579.350,00

5.1.2.2.1 Belanja Tanah

Realisasi belanja modal pengadaan tanah pada tahun 2021 adalah nihil.

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.240.940.000,00 atau sebesar 91,16% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.264.298.500,00. Terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Bantu	21.737.300,00	21.737.300,00	100	0,00
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	44.690.300,00	41.840.000,00		0,00
3	Belanja Modal Pengadaan meja dan kursi kerja	0,00	0,00	0	25.500.000,00
4	Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan	5.559.100,00	5.400.000,00		0,00



No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5	Belanja Modal Komputer	192.311.800,00	172.000.000,00		0,00
TOTAL		264.298.500,00	240.940.000,00		25.500.000,00

5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.0 atau sebesar 0 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.0. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun 2021 adalah nihil.

5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja Aset Tetap Lainnya pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 11.620.000,00 atau sebesar 99,66% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.11.660.000,00. Terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 13. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Musik Lainnya	11.660.000	11.620.000	99,66	15.079.350,00
TOTAL		11.660.000,00	11.620.000,00		15.079.350,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi belanja tidak terduga pada tahun 2021 adalah nihil.

5.1.3 Transfer

Anggaran transfer tahun 2021 adalah nihil.



5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Realisasi transfer bagi hasil pendapatan lainnya tahun 2021 adalah nihil.

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi transfer bantuan keuangan tahun 2021 adalah nihil.

5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Tahun 2021 tidak ada anggaran maupun realisasi untuk transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya.

5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan lainnya terealisasi adalah nihil.

5.1.4 Surplus/Defisit LRA

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
<u>(9.954.214.556,00)</u>	<u>(8.160.779.526,00)</u>	<u>(4.694.751.742)</u>

Surplus/ defisit LRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto tahun anggaran 2021 sebesar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 14. Surplus Defisit LRA Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Operasi	9.678.256.056,00	7.908.219.526,00	81,71	4.654.172.392,00
2	Belanja Modal	275.958.500,00	252.560.000,00	91,52	40.579.350,00
TOTAL		(9.954,214.556,00)	(8.160.779.526,00)	81,98	(4.694.751.742)

5.1.5 Pembiayaan Netto

Pembiayaan *netto* adalah hasil dari selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2021 adalah nihil.

5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2021 adalah nihil.

5.1.6 Sisa Lebih Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA)

Sisa lebih pembiayaan anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto tahun anggaran 2021 adalah nihil.



Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2021 adalah nihil.

5.2 NERACA

5.3.1 Aset Lancar

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	<u>445.000,00</u>	<u>183.500,00</u>

Aset lancar Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 445.000,00 dan Rp.183.500,00 terdiri dari :

Tabel 15. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
4.	Kas di BLUD	0,00	0,00
5.	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
6.	Piutang Pendapatan	0,00	0,00
7.	Piutang Lainnya	0,00	0,00
8.	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
9.	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00
10.	Persediaan	445.000,00	183.500,00
	Jumlah	445.000,00	183.500,00

Adapun penjelasan aset lancar Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

5.3.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah nihil.

5.3.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.



5.3.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

5.3.1.4 Kas di BLUD

Adapun penjelasan saldo kas di BLUD pada masing-masing entitas adalah sebagai berikut :

5.3.1.4.1 Kas di BLUD Dinas Kesehatan

Saldo kas di BLUD Dinas Kesehatan merupakan Kas pada BLUD Puskesmas di wilayah Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Mojokerto.

5.3.1.4.2 Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo

Saldo Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo merupakan Kas pada BLUD Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo.

5.3.1.5 Kas di Bendahara BOS

Akun kas di bendahara BOS adalah posisi dana yang ada pada Unit Pelaksana Teknis, yang merupakan penerimaan langsung dan dibelanjakan sesuai dengan rencana alokasi pembiayaan kegiatan.

5.3.1.7 Piutang Pendapatan

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah nihil.

Adapun penjelasan saldo piutang pendapatan pada tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut :

5.3.1.6.1 Piutang Pajak

Saldo Piutang pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah nihil.

5.3.1.6.2 Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar adalah nihil.

5.3.1.6.3 Piutang Dana Bagi Hasil

Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2021 adalah nihil.

5.3.1.6.4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah nihil dengan rincian sebagai berikut:



1. Piutang BLUD

Piutang BLUD merupakan piutang pada RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo.

2. Piutang Hasil Eksekusi Atas Jaminan

Piutang hasil eksekusi atas jaminan merupakan piutang atas jaminan pelaksanaan pekerjaan putus kontrak.

3. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah merupakan piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah.

5.3.1.7 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar adalah nihil.

Piutang Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.1.7.1 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah nihil.

5.3.1.7.2 Piutang Lain-Lain

Saldo Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah nihil.

5.3.1.8 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah nihil.

Adapun rincian lebih lanjut dari tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut:

5.3.1.8.1 Penyisihan Piutang Pendapatan

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah nihil.

5.3.1.8.2 Penyisihan Piutang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah nihil.

5.3.1.9 Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah beban-beban yang belum merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun Pemerintah Daerah sudah membayarnya terlebih dahulu. Karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban Pemerintah Daerah untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka.



5.3.1.10 Persediaan

Saldo persediaan Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.445.000,00 dan Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian Persediaan

No	Uraian	31 Des 2021 Rp	31 Des 2020 Rp
1	Persediaan Bahan Pakai Habis	445.000,00	183.500,00
	JUMLAH	445.000,00	183.500,00

5.3.1.10.1 Persediaan Bahan Pakai Habis

Saldo Persediaan Bahan Pakai Habis per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.445.000,00 dan Rp.183.500,00 terdiri dari :

Tabel 17. Rician Persediaan Bahan Pakai Habis

Uraian	31 Des 2021 Rp	31 Des 2020 Rp
Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
Alat Listrik dan Elektronik	0,00	0,00
Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	0,00
Kertas/Stop Map/Amplop Kop	445.000,00	183.500,00
Karcis dan Stiker	0,00	0,00
Blangko	0,00	0,00
Buku Uji Kir Kendaraan	0,00	0,00
Plat Uji Kir Kendaraan	0,00	0,00
Suku Cadang Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00
JUMLAH	445.000,00	183.500,00

5.3.1.10.2 Persediaan Bahan Material

Saldo Persediaan Bahan/Material per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

5.3.1.10.3 Persediaan Barang Lainnya

Tidak terdapat Persediaan barang lainnya yang tercatat pada neraca Tahun Anggaran 2021.



5.3.2 Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 merupakan Investasi Permanen.

5.3.2.1 Investasi Permanen

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 merupakan nilai buku penyertaan modal Pemerintah Kota Mojokerto pada Badan Usaha.

5.3.3 Aset Tetap

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4.416.587.567,00	3.454.375.147

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.4.416.587.567,00 dan Rp.3.454.375.147 terdiri atas :

Tabel 18. Rincian Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1.	Tanah	407.750.000,00	222.750.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	1.984.018.883,00	1.578.267.383,00
3.	Gedung dan Bangunan	3.873.993.715,00	3.060.494.965,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.500.000,00	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	118.684.590,00	107.064.590,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.984.359.621,00)	(1.514.201.791,00)
	Nilai Buku	4.416.587.567,00	3.454.375.147,00

Nilai aset tetap yang disajikan tersebut di atas sesuai dengan entry data dan klasifikasi aset pada Sistem Informasi Barang Daerah (Simda BMD).

Adapun penjelasan aset tetap Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

5.3.3.1 Tanah

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
407.750.000,00	222.750.000,00

Saldo Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.407.750.000,00 dan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp.185.000.000 dari tahun 2020 sebesar Rp.222.750.000,00 dengan sebagai berikut:



Tabel 19. Rincian Aset Tetap Tanah

No	Uraian	Saldo Awal Per 31-12-2021	Realisasi Belanja Modal 2021	Penyesuaian/ Koreksi 2021		Saldo Akhir Per 31-12-2021
				Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g
1	Tanah Persil	222.750.000,00	0,00	185.000.000,00	0,00	407.750.000,00
2	Tanah Non Persil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		222.750.000,00	0,00	185.000.000,00	0,00	407.750.000,00

Perhitungan saldo tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp.407.750.000,00 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	222.750.000,00
Penambahan Tahun 2021 :		
a. Realisasi Belanja Modal	Rp	0,00
b. Reklasifikasi aset	Rp	0,00
c. Mutasi Masuk antar SKPD	Rp	185.000.000,00
d. Koreksi	Rp	0,00
	Rp	185.000.000,00
Jumlah	Rp	407.750.000,00
Pengurangan Tahun 2021 :		
a. Penghapusan aset	Rp	0,00
b. Hibah	Rp	0,00
c. Mutasi Keluar antar SKPD	Rp	0,00
d. Reklasifikasi Ke Aset Lain2	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	407.750.000,00

Penjelasan atas perhitungan aset tanah pada Tahun 2021 tidak mengalami penambahan maupun kenaikan.

5.3.3.3 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
1.984.018.883,00	1.578.267.383,00

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 adalah sebesar



Rp.1.984.018.883,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp.405.751.500,00 dari tahun 2020 sebesar Rp.1.578.267.383,00 dengan sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Permendagri 64/2013				
		Saldo Awal	Realisasi	Penyesuaian / Koreksi 2021		Saldo Akhir
		Per 31-12-2020	Belanja Modal 2021	Tambah	Kurang	Per 31-12-2021
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g
1	Electric Generating Set	0,00	21.700.000,00	0,00	0,00	21.700.000,00
2	Pompa	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
3	Kendaraan Dinas Bermotor perorangan	382.980.000,00	0,00	0,00	0,00	382.980.000,00
4	Kendaraan Bermotor angkutan Barang	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00
5	Kendaraan Bermotor beroda dua	51.479.000,00	0,00	0,00	0,00	51.479.000,00
6	Alat Reproduksi (penggandaan)	0,00	0,00	11.998.400,00	0,00	11.998.400,00
7	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	134.150.000,00	6.160.000,00	21.267.000,00	0,00	161.577.000,00
8	Alat Kantor Lainnya	42.983.875,00	13.255.000,00	7.800.000,00	0,00	64.038.875,00
9	Mebel	70.537.500,00	0,00	18.901,200,00	0,00	89.438.700,00
10	Alat Pendingin	92.187.480,00	0,00	36.706.000,00	0,00	128.893.480,00
11	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	68.510.840,00	3.450.000,00	8.525.000,00	0,00	80.485.840,00
12.	Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	2.926.000,00	0,00	2.926.000,00
13.	Meja kerja Pejabat	62.375.900,00	0,00	0,00	0,00	62.375.900,00
14	Meja Rapat Pejabat	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
15	Kursi Kerja Pejabat	9.423.100,00	18,975.000,00	0,00	0,00	28.398.100,00
16	Kursi Rapat Pejabat	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
17	Kursi Tamu di ruangan Pejabat	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	5.950.000,00
18	Lemari dan Arsip Pejabat	600.000,00	0,00	34.650.000,00	0,00	35.250.000,00
19	Peralatan studio Audio	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
20	Peralatan Studio Video dan film	50.487.500,00	0,00	0,00	0,00	50.487.500,00
21	Alat Komunikasi Telephone	20.549.000,00	0,00	0,00	0,00	20,549.000,00
22	Alat Komunikasi Radio HF/FM	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
23	Alat Komunikasi Radio VHF	26.503.400,00	0,00	0,00	0,00	26.503.400,00
24	Alat Komunikasi Radio UHF	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
25	Alat Kesehatan Matra Laut	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
26	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
27	General Laboratory Tool	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
28	Personal Komputer	232.533.500,00	142.400.000,00	0,00	0,00	374.933.500,00
29	Peralatan Personal Komputer	51.526.288,00	29.600.000,00	7.435.900,00	0,00	88.562.188,00
30	Peralatan Jaringan	14.990.000,00	0,00	11.902.000,00	0,00	26.892.000,00
31	Alat Pendukung Pencarian	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
	Jumlah	1.578.267.383,00	240.940.000,00	164.811.500,00	0,00	1.984.018.883,00



Perhitungan saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.984.018.833,00 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020		Rp	1.578.267.383,00
Penambahan Tahun 2021 :			
a. Realisasi Belanja Modal	Rp	240.940.000,00	
b. Reklasifikasi aset	Rp	0,00	
c. Mutasi Masuk	Rp	164.811.500,00	
d. Realisasi Dari Barjas	Rp	0,00	
e. Hibah	Rp	0,00	
f. Koreksi	Rp	0,00	
		Rp	405.751.500,00
Jumlah		Rp	1.984.018.883,00
Pengurangan Tahun 2021 :			
a. Reklasifikasi aset	Rp	0,00	
b. Extracomptable	Rp	0,00	
c. Koreksi	Rp	0,00	
d. Penghapusan	Rp	0,00	
e. Mutasi keluar	Rp	0,00	
f. Barang non aset	Rp	0,00	
g. Reklasifikasi ke aset lain2	Rp	0,00	
h. Temuan kurang volume	Rp	0,00	
		Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2021		Rp	0,00

Penjelasan atas rincian nilai penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp.405.751.500,00 antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Modal tahun 2021 terdiri dari belanja modal SKPD sebesar Rp.240.940.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Tahun 2021

No.	Uraian	Nilai
1	Tangga Aluminium	3.450.000,00
2	Room Humidifier	5.400.000,00
3	printer	21.900.000,00
4	monitor	7.700.000,00
5	Laptop	142.400.000,00
6.	CCTV (camera control television)	13.255.000,00
7.	Kursi kerja Pejabat Eselon	18.975.000,00
8.	locker	6.160.000,00
-	JUMLAH	240.940.000,00



- b. Rincian penambahan asset melalui Mutasi asset dari SKPD tahun 2021 terdiri sebesar Rp.164.811.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Tahun 2021

No.	Uraian	Nilai
1	Pompa	2.700.000,00
2	Alat Reproduksi (penggandaan)	11.998.400,00
3	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	21.267.000,00
4	Alat Kantor Lainnya	7.800.000,00
5	mebel	18.901,200,00
6.	Alat Pendingin	36.706.000,00
7.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.525.000,00
8.	Alat Pemadam Kebakaran	2.926.000,00
9.	Lemari dan Arsip Pejabat	34.650.000,00
10	Peralatan Personal Komputer	7.435.900,00
11	Peralatan Jaringan	11.902.000,00
-	JUMLAH	164.811.500,00

Sedangkan Penjelasan atas rincian nilai pengurangan aset tetap peralatan dan mesin adalah tidak ada pengurangan pada aset tetap peralatan dan mesin.

5.3.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>3.873.993.715,00</u>	<u>3.060.494.965,00</u>

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.3.873.993,715,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp.813.498.750,00 dari tahun 2020 sebesar Rp.3.060.494.965,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Saldo Awal Per 31-12-2020	Realisasi Belanja Modal 2021	Penyesuaian/ Koreksi 2021		Saldo Akhir Per 31-12-2021
				Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.060.494.965,00	00,00	483.281.750,00	0,00	3.543.776.715,00
2	Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	330.217.000,00	0,00	330.217.000,00
	Jumlah	3.060.494.965,00	0,00	813.498.750,00	0,00	3.873.993.715,00



Perhitungan saldo aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.3.873.993.715,00 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020		Rp	3.066.494.965,00
Penambahan Tahun 2021 :			
a. Realisasi Belanja Modal	Rp	0	
b. Reklasifikasi aset	Rp	0	
c. Mutasi Masuk	Rp	813.498.750,00	
d. Hibah	Rp	0	
e. Realisasi Dari Belanja Barjas	Rp	0	
f. Koreksi	Rp	0	
		Rp	813.498.750,00
Jumlah		Rp	3.873.993.715,00
Pengurangan Tahun 2021 :			
a. Reklasifikasi aset	Rp	0	
b. Extracomtable	Rp	0	
c. Barang non aset	Rp	0	
d. Penghapusan	Rp	0	
e. Mutasi Keluar	Rp	0	
f. Hibah	Rp	0	
g. Reklasifikasi ke Aset Lain2	Rp	0	
h. Temuan Kekurangan Volume	Rp	0	
		Rp	0
Saldo per 31 Desember 2021		Rp	0

Penjelasan atas rincian nilai penambahan aset tetap gedung dan bangunan melalui mutasi SKPD sebesar Rp.813.498.759,00 antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Modal tahun 2021 terdiri dari belanja modal SKPD sebesar Rp.,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 24. Rincian Penambahan Gedung dan Bangunan dari Mutasi SKPD Tahun 2021

No.	Uraian	Nilai
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	483.281.750,00
2	Bangunan Gedung Laboratorium	330.217.000,00
	JUMLAH	813.498.750,00

Sedangkan Penjelasan atas rincian nilai pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan antara lain tidak ada pengurangan pada aset tetap Gedung dan Bangunan.



5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
16.500.00,00	0,00

Saldo Aset Tetap berupa Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 melalui mutasi SKPD adalah sebesar Rp 16.500.000,00 dan mengalami penambahan sebesar Rp.16.500.000,00 dari tahun 2020 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	Saldo Awal Per 31-12-2020	Realisasi Belanja Modal 2021	Penyesuaian/ Koreksi 2021		Saldo Akhir Per 31-12-2021
				Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g
1	Jaringan distribusi	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00

Perhitungan saldo aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.16.500.000,00 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020		Rp	0,00
Penambahan Tahun 2021 :			
a. Realisasi Belanja Modal	Rp		0
b. Reklasifikasi aset	Rp		0
c. Mutasi Masuk	Rp	16.500.000,0	
d. Realisasi Dari Belanja Barjas	Rp		0
e. Koreksi	Rp		0
		Rp	16.500.000,00
Jumlah		Rp	16.500.000,00
Pengurangan Tahun 2021 :			
a. Reklasifikasi aset	Rp		0
b. Extracomptable	Rp		0
c. Barang non aset	Rp		0
d. Mutasi Keluar	Rp		0
e. Hibah	Rp		0
f. Reklas Ke Aset Lain2	Rp		0
g. Temuan Kekurangan Volume	Rp		0
		Rp	0
Saldo per 31 Desember 2021		Rp	16.500.000,00

Penjelasan atas rincian nilai aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.



5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
118.684.590,00	107.064.590,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.118.684.590,00 dan Rp.107.064.590,00.

Tabel 26. Rincian Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Saldo Awal Per 31-12-2020	Realisasi Belanja Modal 2021	Penyesuaian/ Koreksi 2021		Saldo Akhir Per 31-12-2021 (h) = c + f - g
				Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h)
1	Karya Grafika	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.	Three dimensional Artefacts and realita	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Alat Musik	105.764.590,00	0,00	0,00	0,00	105.764.590,00
4	Musik Lainnya	0,00	0,00	11.620.000,00	0,00	11.620.000,00
	Jumlah	107.064.590,00	0,00	11.620.000,00	0,00	118.684.590,00

Perhitungan saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp118.684.590,00 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	107.064.590,00
Penambahan Tahun 2021 :		
a. Realisasi Belanja Modal	Rp	0
b. Reklasifikasi aset	Rp	0
c. Mutasi Masuk	Rp	11.620.000,0
d. Realisasi Dari Belanja Barjas	Rp	0
e. Koreksi	Rp	0
	Rp	11.620.000,00
Jumlah	Rp	118.684.590,00
Pengurangan Tahun 2021 :		
a. Reklasifikasi aset	Rp	0
b. Extracomptable	Rp	0
c. Barang non aset	Rp	0
d. Mutasi Keluar	Rp	0
e. Hibah	Rp	0
f. Reklas Ke Aset Lain2	Rp	0
g. Temuan Kekurangan Volume	Rp	0
	Rp	0
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	118.684.594,00



Penjelasan atas rincian nilai penambahan aset tetap lainnya melalui Belanja Modal SKPD sebesar Rp.11.620.000,00 antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal tahun 2021 terdiri dari belanja modal SKPD sebesar Rp.11.620.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Tahun 2021

No.	Uraian	Nilai
1	Musik Lainnya	11.620.000,00
-	JUMLAH	11.620.000,00

5.3.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Perhitungan saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020		Rp	0
Penambahan Tahun 2021 :			
a. Reklasifikasi aset	Rp	0	
b. Realisasi Dari Belanja Barjas	Rp	<u>0</u>	
		Rp	0
Jumlah		Rp	0
Pengurangan Tahun 2021 :			
a. Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp	<u>0</u>	
		Rp	0
Saldo per 31 Desember 2021		Rp	0

Penjelasan atas aset konstruksi dalam pengerjaan pada Tahun 2021 sebesar Rp.0,00

5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	<u>(1.984.359.621,00)</u>	<u>(1.514.201.791,00)</u>

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyajian nilai penyusutan dilakukan sebagai konsekuensi logis atas penyajian nilai aset tetap yang menggunakan metode harga perolehan. Penghitungan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kota Mojokerto dilakukan



secara tahunan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) pada jenis aset tetap non tanah, tanaman dan hewan.

Pemerintah Kota Mojokerto telah menerapkan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Buletin Teknis SAP No. 18. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2021 adalah sebesar minus Rp.(1.984.359.621,00,00) dengan rincian dan mutasi tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian dan Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Jenis Aset	Saldo Awal 2020 (Rp) (a)	Penambahan (Rp) (b)	Pengurangan (Rp) (c)	Saldo Akhir 2021 (Rp) (d) = a - b + c
Peralatan Dan Mesin	(1.265.016.134,00)	(238.767.206,00)	0,00	(1.503.783.340,00)
Gedung Dan Bangunan	(168.000.417,00)	(214.993.292,00)	0,00	(382.993.709,00)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	(16.500.000)	0,00	(16.500.000,00)
Aset Tetap Lainnya	(81.185.240,00)	,00	0,00	(81.185.240,00)
JUMLAH	(1.514.201.791,00)	(470.260.498,00)	0,00	(1.984.462.209,00)

Perhitungan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar minus Rp.(1.984.359.621,00) adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021

Penambahan Tahun 2021 : Rp (1.514.201.791,00)

a. Beban Penyusutan Rp (470.260.498,00)

b. Reklas Masuk Antar Objek Rp 0

Rp (470.260.498,00)

Jumlah

Rp (1.984.462.289,00)

Pengurangan Tahun 2021 :

a. Penghapusan Aset Tetap Rp 0

b. Koreksi Akumulasi Penyusutan Rp 0

c. Reklas Masuk Antar Objek Rp 0

d. Reklas ke Akm Pinjam Pakai Rp 0

Rp 0

Saldo per 31 Desember 2021

Rp 1.984.462.2090,00

a. Penjelasan atas penambahan akumulasi penyusutan aset tetap pada Tahun 2021 sebesar Rp.(470.260.498,00) adalah sebagai berikut:

b. Reklas masuk antar objek sebesar Rp.0,00 merupakan perpindahan antar objek yang terjadi pada akumulasi aset tetap.

Penjelasan atas pengurangan akumulasi aset tetap pada Tahun 2021 sebesar Rp.0,00 adalah tidak mengalami pengurangan.



5.3.4 Aset Lainnya

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0.00</u>

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 terdiri atas :

Tabel 29. Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
	JUMLAH	NIHIL	NIHIL

Rincian tabel tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

5.3.4.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 merupakan jaminan jasa bongkar pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Jaminan Jasa bongkar ini adalah merupakan uang titipan atas biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Kota Mojokerto yang akan digunakan sebagai biaya bongkar reklame jika masa pemasangan reklame telah berakhir.

Pada tahun 2021 uang jaminan jasa bongkar yang ada di rekening bendahara penerimaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja telah disetor ke rekening kas daerah sehingga saldo kas menjadi nihil.

5.3.4.3 Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,00 merupakan nilai buku atas aset tak berwujud pada tahun berkenaan.

Rincian aset tidak berwujud tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

5.3.4.3.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.34.860.000,00 dan Rp.34.860.000,00.



5.3.4.3.2 Amortisasi Depresiasi

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 merupakan nilai amortisasi penyusutan aset tidak berwujud. Sejak tahun 2014 Pemerintah Kota Mojokerto menerapkan kebijakan amortisasi aset tak berwujud.

5.3.4.4 Aset Lain-Lain

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,00.

5.3.4.4.1 Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,00.

5.3.4.4.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 merupakan akumulasi penyusutan dari aset lain-lain.

5.3.4.5 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 Pemerintah Kota Mojokerto sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 merupakan tuntutan ganti kerugian daerah yang memiliki masa jatuh tempo melebihi satu tahun anggaran.

5.3.5 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>447.673.500,87</u>

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan. Pada Tahun 2021 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto sebesar Rp.0,00.

5.3.5.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Rincian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :



5.3.5.1.1 Utang PPh Pusat

Saldo Utang PPh Pusat per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00.

5.3.5.1.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00.

5.3.5.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

5.3.5.3 Utang Beban

Utang beban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Utang beban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, kewajiban kepada masyarakat dan kewajiban kepada pemberi jasa.

Saldo utang beban per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Uraian utang beban tersebut di atas adalah sebagai berikut :

5.3.5.3.1 Utang Beban Pegawai

Saldo utang beban pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

5.3.5.3.2 Utang Beban Barang dan Jasa

Saldo utang beban barang dan jasa per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

5.3.5.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,00 dan Rp.447.673.500,87, terinci sebagai berikut :

Tabel 30. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	31 Des 2021 Rp	31 Des 2020 Rp
1	Utang kelebihan Pembayaran Transfer	0,00	0,00
2	Utang Pengadaan Aset Tetap	0,00	0,00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Uraian tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut.

5.3.5.4.1 Utang kelebihan Pembayaran Transfer

Saldo utang kelebihan pembayaran transfer per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00.



5.3.5.4.2 Utang Pengadaan Aset Tetap

Saldo pengadaan utang pengadaan aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00.

5.3.5.4.1 Utang Jangka Pendek Lain-Lain

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00 merupakan jaminan jasa bongkar pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Jaminan Jasa bongkar ini adalah merupakan uang titipan atas biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Kota Mojokerto yang akan digunakan sebagai biaya bongkar reklame jika masa pemasangan reklame telah berakhir.

5.3.6 Ekuitas

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	<u>4.417.032.567,00</u>	<u>3.454.558.647,00</u>

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.4.417.032.567,00 dan Rp.3.454.558.647, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 31. Rincian Ekuitas

No	Uraian	31 Des 2021 Rp	31 Des 2020 Rp
1	Saldo Awal Ekuitas	3.454.558.647,00	3.600.393.175,00
2	Surplus/(Defisit) LO	(8.094.013.003,00)	(4.840.596.270,00)
3	Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
4	Mutasi Aset Antar SKPD	895.707.397,00	0,00
5	R/K PPKD	8.160.779.526,00	4.694.751.742,00
	Jumlah	4.417.032.567,00	3.454.558.647,00

Adapun penjelasan koreksi ekuitas secara lebih terinci, terdapat pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 Pendapatan - LO

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Mojokerto yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan



Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan-LO per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan-LO pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0 %, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32. Rincian Pendapatan LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	LRA
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	Pendapatan Transfer-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
0,00	0,00

Pendapatan asli daerah-LO pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.0,00 atau mengalami kenaikan sebesar 53% dari tahun sebelumnya. Pendapatan asli daerah-LO terdiri dari empat jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 33. Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	LRA
1.	Pajak Daerah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	Retribusi Daerah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan pajak daerah-LO yang diakui oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto pada tahun 2021 sebesar Rp.0,00.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO



Pendapatan retribusi daerah-LO sebesar Rp.0,00 pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0% dari tahun sebelumnya. Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	LRA (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4.	Retribusi Izin Trayek-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah-LO adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum-LO
Retribusi jasa umum-LO tahun 2021 sebesar Rp.0,00.
- 2) Retribusi Jasa Usaha-LO
Retribusi jasa usaha-LO sebesar Rp.00,00 terdiri dari:

Tabel 35. Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	LRA (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

- 3) Retribusi Perizinan Tertentu-LO
Retribusi perizinan tertentu-LO sebesar Rp.,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36. Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	LRA (Rp)
1	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Retribusi Izin Trayek-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



Perhitungan Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Perhitungan Pendapatan Retribusi – LO

No.	Uraian	LRA (Rp)	Piutang 2020	Piutang 2021	Pendapatan Diterima Dimuka 2020	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 3-4+5+6
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	Retribusi Izin Trayek-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO sebesar Rp.0,00 merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan Pemerintah Kota Mojokerto.

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah-LO tahun 2021 sebesar Rp.0,00.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer -LO

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Pendapatan transfer-LO yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.0,00.

Rincian masing-masing jenis pendapatan transfer-LO adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - LO

Transfer pemerintah pusat -LO sebesar Rp.0,00.

5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Transfer pemerintah pusat lainnya-LO pada tahun 2021 sebesar Rp.0,00.

5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO pada tahun 2021 sebesar Rp.0,00.

5.4.1.2.4 Bantuan Keuangan – LO

Bantuan keuangan-LO pada tahun 2021 sebesar Rp.0,00.



5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LO

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO tahun 2021 sebesar Rp.0,00 merupakan Pendapatan Hibah berupa uang maupun barang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi ataupun pihak lainnya.

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah-LO pada tahun 2021 sebesar Rp.0,00.

5.4.2 Beban Operasional

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>8.094.013.003,00</u>	<u>4.840.586.270,00</u>

Pengakuan beban pada Tahun 2021 sebesar Rp.8.094.013.003,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 38. Rincian Beban Operasional

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Pegawai-LO	3.001.992.875,00	2.930.704.103,00	2,43
2	Beban Barang dan Jasa	3.375.994.151,00	1.723.504.789,00	95,88
3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00
5	Beban Hibah	1.508.611.000,00	0,00	0,00
6	Beban bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
7	Beban penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
8	Beban Lain -lain	0,00	0,00	0,00
9	Bebanan Peralatan dan Mesin	118.543.327,00	114.037.545,00	3,95
10	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	88.8761.650,00	70.692.332,00	25,72
11	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi	0,00	1.647.501,00	(100,00)
12	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
13	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
14	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
15	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		8.094.013.003,00	4.840.586.270,00	67,21



5.4.2.1 Beban Pegawai

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>3.001.992.875,00</u>	<u>2.930.704.103,00</u>

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Nilai beban pegawai pada tahun 2021 sebesar Rp.3.001.992.875,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.71.388.772,00 atau 2,43% dibandingkan dengan nilai beban pegawai Tahun 2020 yakni sebesar Rp.2.930.704.103,00, Pengakuan beban pegawai sebesar Rp.3.001.992.875,00 terdiri dari :

Tabel 39. Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	LRA (Rp)
1	Beban Gaji dan Beban Tunjangan – LO	3.001.992.875,00	2.930.704.103,00	2,43	3.001.992.875,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimp & Angg DPRD serta KDH/WKDH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Uang Lembur - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Pegawai BOSNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.001.992.875,00	2.930.704.104,00	0,00	3.001.992.875,00



5.4.2.2 Beban Persediaan

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Beban Persediaan sebesar Rp.0,00 terdiri dari:

Tabel 40. Rincian Beban Persediaan

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	LRA (Rp)
1	Beban Bahan Pakai Habis	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Beban Bahan/Material	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Beban Cetak dan Penggandaan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	Beban Makanan dan Minuman	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
6	Beban Pakaian Kerja	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
7	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
8	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Selisih antara belanja persediaan dengan beban persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Persediaan	0,00
Pengakuan Aset tetap dari belanja persediaan	0,00
Persediaan 2020	0,00
Persediaan 2021	0,00
Beban Persediaan	0,00

5.4.2.3 Beban Jasa

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Beban Jasa tahun 2021 sebesar Rp.0,00 terdiri dari:

Tabel 41. Rincian Beban Jasa

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	LRA (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	LRA (Rp)
2	Beban Premi Asuransi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	Beban Sewa Sarana Mobilitas	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5	Beban Sewa Alat Berat	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
6	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
7	Beban Jasa Konsultasi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
8	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
9	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
10	Beban Honorarium Non Pegawai	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
11	Beban Honorarium PNS - LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
12	Beban Honorarium Non PNS - LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
13	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
14	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
15	Beban Barang Dana BOS	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
16	Beban Barang dan Jasa BLUD	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
17	Belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Beban Pemeliharaan sebesar Rp.0,00 terdiri dari:

Tabel 42. Rincian Beban Pemeliharaan

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	LRA (Rp)
1	Beban Jasa Service	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Beban Penggantian Suku Cadang	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	Beban Jasa KIR	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
6	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	LRA (Rp)
7	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
8	Beban Pemeliharaan Tanah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
9	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
10	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
11	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
12	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
13	Beban Pemeliharaan (DAK)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Beban perjalanan dinas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0,00 terdiri dari:

Tabel 43. Rincian Beban Perjalanan Dinas

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	LRA (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	Beban Akomodasi dan Transportasi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.4.2.6 Beban Hibah

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>1.508.611.000,00</u>	<u>0,00</u>

Pengakuan Beban hibah sebesar Rp.1.508.611.00,00.



5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Pengakuan Beban Bantuan Sosial tahun 2021 sebesar Rp.0,00.

5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>207.414.977,00</u>	<u>186.377.378,00</u>

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2021 sebesar Rp.207.414.977,00, terdiri dari:

Tabel 44. Rincian Beban Penyusutan

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	118.543.327,00	114.037.545,00	3,95
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	88.871.650,00	70.692.332,00	25,72
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	1.647.501,00	(100,00)
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Jumlah		207.414.977,00	186.377.378,00	89,85

5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Beban Penyisihan Piutang tahun 2021 sebesar Rp.0,00.

5.4.2.10 Beban Lain-Lain

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Beban lain-lain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, Beban lain-lain Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp.0,00.

5.4.2.11 Beban Transfer

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Beban Transfer tahun 2021 sebesar Rp.0,00.

5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
<u>(0,00)</u>	<u>(0,00)</u>

Surplus Dari Kegiatan Operasional sebesar tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 45. Rincian Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Pendapatan - LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Beban Operasional	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Surplus Dari Kegiatan Operasional sebesar tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

5.4.5 Surplus/Defisit Pos Luar Biasa

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>(8.094.013.003,00)</u>	<u>(4.840.586.270,00)</u>

Pada tahun 2021 tidak terdapat surplus/defisit pos luar biasa sebesar Rp. 8.094.013.003,00



5.4.6 Surplus/Defisit LO

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>(0,00)</u>	<u>(0,00)</u>

Pada tahun 2021 mengalami Defisit LO sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46. Rincian Surplus/ Defisit LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Surplus / Defisit Kegiatan Operasional	0,00	0,000	
2	Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	
3	Surplus / Defisit Pos Luar Biasa	0,00	0,00	
Jumlah		0,00	0,00	0,00

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan,

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>3,454.558.647,00</u>	<u>3.600.393.175,00</u>

Saldo awal ekuitas tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp.3.454.558.647,00 dan Rp.3.600.393.175,00 merupakan saldo akhir ekuitas tahun sebelumnya pada neraca *audited* tahun sebelumnya.

5.6.2 Surplus/Defisit LO

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>(8.094.013.003,00)</u>	<u>(4.840.586.270,00)</u>

Surplus/defisit – LO tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp.8.094.013.003,00 dan Rp.4.840.586.270,00 merupakan nilai surplus pada Laporan Operasional Tahun 2021 dan 2020 yang menambah nilai



ekuitas pada Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto tahun berkenaan.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah tahun 2021, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari Mutasi Aset Antar SKPD pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
3	Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
4	Mutasi Aset Antar SKPD	895.707.397,00	0,00
Jumlah		895.707.397,00	0,00

Penjelasan tabel di atas adalah sebagai berikut

5.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Koreksi nilai persediaan tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,00.

5.6.3.2 Koreksi Ekuitas Lainnya

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Koreksi tambah atas nilai ekuitas akhir dari koreksi ekuitas lainnya tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 yang terdiri atas :

Tabel 48. Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Aset rusak berat	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00



5.6.4 Ekuitas Akhir

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>4.417.032.567,00</u>	<u>3.454.558.647,00</u>

ekuitas akhir tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp.4.417.032.567,00 dan Rp.3.454.558.647,00 merupakan saldo akhir ekuitas tahun berkenaan pada neraca *audited* tahun berkenaan.



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan good governance.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Mojokerto Tahun 2021 secara keseluruhan.